

ANALISIS STRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Akbar Nazwar¹⁾, Wahyu Hamidi²⁾, Sri Endang Kornita²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

E-mail: akbar.nazwar@gmail.com

Analysis Of The Structure Of Economic Growth And Income Inequality Between Districts/Cities In The Province Of Riau

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the amount of inequality between regions and economic growth in the Province Of Riau based on the rate of growth and per capita income. The type of data used in this research is secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS). The analytical method used is the Location Quotient (LQ) analysis, Klassen typology, Williamson index, and Theil Entropy index. The results of the study using Location Quotient (LQ) analysis show that the districts of Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, and Rokan Hulu are based on the agricultural sector. The districts of Kampar, Bengkalis, and Rokan Hilir are based on the mining sector. The districts of Pelalawan, Siak, and Dumai city are based on the manufacturing sector. Indragiri Hulu district is based on the water supply sector, the Meranti Island are based on the transportation sector, and Pekanbaru city is based on the financial services sector. Based on Klassen typology analysis, its explained that there are still areas in Riau Province which are classified as relatively underdeveloped areas, namely Kampar regency, Indragiri Hulu regency, and Rokan Hilir Regency. Inequality of income between regions in Riau Province in 2015-2019 is classified as moderate inequality and has a downward trend.

Keywords : Income inequality, Economic Growth, Base Sector.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata dan kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Oleh

karena itu kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dan berbeda-beda bagi masing-masing daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Untuk itu perhatian pemerintah harus tertuju pada semua daerah tanpa ada perlakuan khusus pada daerah tertentu saja. Namun hasil pembangunan terkadang masih

dirasakan belum merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau yang belum stabil masih meninggalkan permasalahan yang harus dihadapi. Salah satu realitas pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh keadaan tidak stabilnya laju pertumbuhan adalah terciptanya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota, ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ini merupakan masalah yang harus dicari jalan penyelesaiannya. Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah harus sesuai dengan prioritas yang dimilikinya, sehingga akan terlihat peranan dari sektor-sektor potensial terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, sebagaimana yang diperlihatkan pada perkembangan PDRB dan sektor-sektornya.

Ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Kajian pertumbuhan

ekonomi dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Riau dilihat melalui PDRB dan pendapatan perkapitanya. Dengan demikian dapat dicermati laju pertumbuhan ekonominya. Sedangkan pendapatan perkapita merupakan hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk yang dijadikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan daerah di wilayah Provinsi Riau, akan dibahas ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson dan Indeks Ketimpangan Entropi Theil. Sebagai provinsi yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, maka Provinsi Riau dituntut untuk mandiri, sehingga perlu mengembangkan potensi-potensi yang ada. Pengembangan potensi sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) diharapkan mampu mengatasi isu-isu ekonomi yang saat ini sedang berkembang.

Pertumbuhan ekonomi dengan proses yang berkelanjutan merupakan kondisi utama yang diharapkan dalam kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah, berarti kebutuhan ekonomi juga ikut bertambah. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Terlebih lagi dengan diberlakukannya otonomi yang memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap perkembangan daerahnya. Maka, perlu dilakukan pengkajian tentang sektor unggulan yang menjadi kegiatan basis, bagaimana klasifikasi

daerah, serta ketimpangan yang ada di Provinsi Riau. Sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2004).

(Todaro 2006), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.

Menurut (Todaro 2006), ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk yang pada tahun-tahun berikutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara

keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Tarigan, 2005). Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Teori Basis Ekonomi

Perekonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif yang cukup tinggi, sehingga mampu mengekspor barang dan jasa ke luar batas-batas perekonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian wilayah tersebut. Sektor non basis ini berfungsi sebagai sektor penunjang

sektor basis atau *service industries* (Sjafrizal, 2008).

Permasalahan yang berat dalam menggunakan analisis ini adalah ketepatan dalam pemilahan antara kegiatan basis dan non basis dan berapa sebenarnya porsi masing-masing dalam perekonomian wilayah (Tarigan, 2007).

Struktur Ekonomi

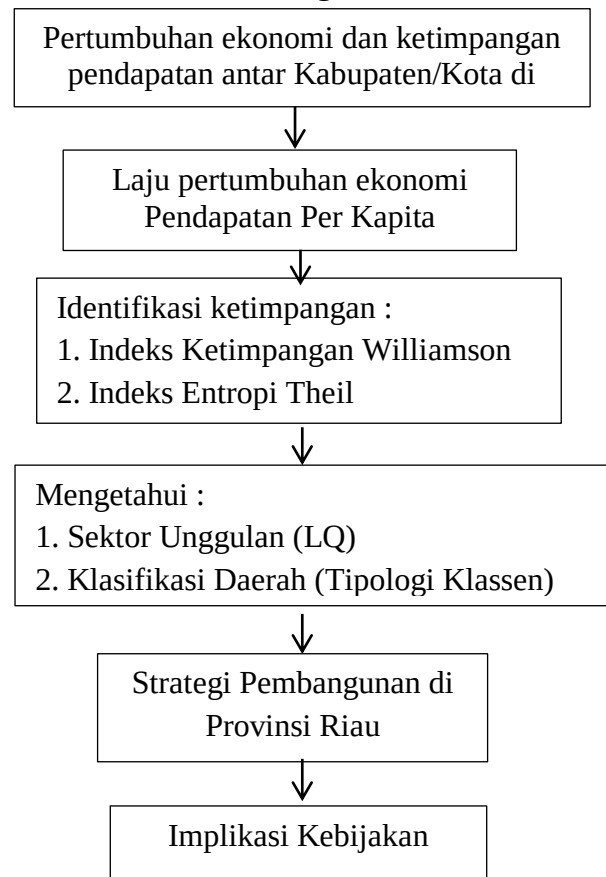
Struktur perekonomian adalah persentase sumbangan berbagai sektor dalam suatu daerah yang berfungsi untuk mengembangkan perekonomian daerah yang mana terdiri dari sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output. Sektor-sektor ini saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi layaknya struktur organisasi (Todaro, 2006).

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Ketimpangan pembangunan ekonomi regional merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Oleh sebab itulah, tidak mengherankan jika pada setiap negara/daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah meliputi seluruh daerah-daerah yang terdapat di Provinsi Riau. Data yang diperlukan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder untuk periode tahun 2015-2019. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari BPS Propinsi Riau. Variabel Penelitian ini meliputi : Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan ketimpangan pendapatan

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ), analisis Tipologi

Klassen, dan untuk menganalisis ketimpangan menggunakan dua alat analisis yakni Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah dari BPS Riau, telah diketahui hasil dari penelitian sebagaimana yang akan dijabarkan berikut ini.

Berdasarkan hasil tabulasi dari data yang telah diolah terhadap 17 sektor ekonomi dan 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau didapatkan bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat lima sektor perekonomian yang dimana nilai LQ nya melebihi 1, di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 11 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi dari 1, di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 6 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi 1, di Kabupaten Pelalawan terdapat 2 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi 1, di Kabupaten Siak terdapat 6 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi angka 1, di Kabupaten Kampar terdapat 4 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi angka 1, di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 4 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi angka 1, di Kabupaten Bengkalis terdapat 2 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi 1, di Rokan Hilir terdapat 2 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi angka 1, di Kepulauan Meranti terdapat 3 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi 1, di Kota Pekanbaru terdapat 14 sektor yang nilai LQ nya melebihi angka 1, dan di Kota Dumai

terdapat 11 sektor perekonomian yang nilai LQ nya melebihi angka 1.

Sebagaimana analisis *Location Quotient* (LQ) ini berguna untuk mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Nilai LQ yang lebih dari 1 maka sektor di wilayah tersebut berpotensi untuk dikembangkan. Apabila ada beberapa sektor yang memiliki Nilai LQ diatas 1, maka sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi.

Pembagian kuadran berdasarkan Tipologi Klassen yang ada di Provinsi Riau pada tahun 2015-2019 terbagi menjadi empat klasifikasi. Pada kuadran 1 hanya terdapat Kota Dumai yang terklasifikasi, dalam kuadran 2 terdapat Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis, di kuadran 3 terdapat Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi yang terklasifikasi, dan pada kuadran 4 terdapat Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir yang terklasifikasi.

Perbedaan PDRB Perkapita memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Tabel 1 Hasil Perhitungan Dari Indeks Williamson di Provinsi Riau Tahun 2015-2019

Tahun	Indeks Williamson
2015	0,42
2016	0,39
2017	0,37
2018	0,35
2019	0,33

Sumber : Data Olahan BPS Provinsi Riau

Dapat dilihat dari tabel 1 nilai Indeks Williamson di Provinsi Riau dari lima tahun pengamatan, angka ketimpangan semakin mendekati nol.

Tabel 2 Data Hasil Perhitungan Dari Indeks Entropi Theil di Provinsi Riau Tahun 2015-2019

Tahun	Indeks Entropi Theil
2015	1,162
2016	1,160
2017	1,159
2018	1,160
2019	1,159

Sumber : Data Olahan BPS Provinsi Riau

Berdasarkan tabel 2 perhitungan Indeks Entropi Theil, dapat diperoleh gambaran bahwa masih terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau pada tahun 2015-2019.

PEMBAHASAN

Analisis Location Quotient (LQ)

a. Sektor Pertanian

Wilayah yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor basis yaitu : Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu.

b. Sektor Pertambangan

Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang berbasis pada sektor pertambangan.

c. Sektor Industri Pengolahan

Pada sektor industri pengolahan terdapat tiga wilayah yang menjadikannya sektor basis yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai.

d. Sektor Listrik dan Gas

Dalam sektor listrik dan gas tidak terdapat Kabupaten/Kota yang menjadikan sektor ini menjadi sektor basis utama. Namun nilai dari sektor

ini yang melebihi angka satu ditemui pada Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,21, di Kota Pekanbaru sebesar 3,57 dan di Kota Dumai sebesar 1,29.

e. Sektor Pengadaan Air

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan daerah yang bersektor basis pada sektor pengadaan air,

f. Sektor Konstruksi

Sama halnya dengan sektor listrik dan gas, sektor konstruksi tidak terdapat Kabupaten/Kota yang menjadikan sektor ini sebagai sektor basis utamanya. Akan tetapi terdapat wilayah yang mempunyai nilai LQ melebihi angka satu, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1,55, Kota Pekanbaru sebesar 3,47, dan Kota Dumai sebesar 1,24.

g. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan juga tidak terdapat wilayah yang menjadikan sektor ini sebagai sektor basis utama. Wilayah yang mempunyai nilai LQ melebihi angka satu adalah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1,05, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,51, Kota Pekanbaru sebesar 3,08, dan Kota Dumai sebesar 1,92.

h. Sektor Transportasi

Kepulauan Meranti menjadikan sektor transportasi sebagai sektor basisnya berdasarkan hasil rata-rata analisis LQ dari tahun 2015-2019 dengan nilai sebesar 2,78.

i. Sektor Akomodasi dan Makan/Minum

Tidak ada Kabupaten/Kota yang menjadikan sektor akomodasi dan makan/minum sebagai basis utama wilayahnya. Nilai LQ yang melebihi angka satu seperti Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1,70, Kota Pekanbaru sebesar 3,64, dan Kota Dumai sebesar 1,58.

j. Sektor Informasi dan Komunikasi

Sama halnya seperti sektor sebelumnya, tidak ada wilayah yang menjadikan sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor basis utamanya. Wilayah yang menghasilkan nilai LQ lebih dari satu adalah : Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,26, Kota Pekanbaru sebesar 3,39, dan Kota Dumai sebesar 1,39.

k. Sektor Jasa Keuangan

Sebagai ibu kota dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru adalah daerah yang berbasis pada sektor keuangan.

l. Sektor Real Estate

Pada sektor ini tidak ada wilayah yang menjadikannya sektor basis utama. Dan nilai analisis LQ yang melebihi angka satu terdapat pada Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1,37, Kabupaten Kampar sebesar 1,07, dan Kota Pekanbaru sebesar 3,10.

m. Sektor Jasa Perusahaan

Dalam sektor ini masih tidak terdapat wilayah yang menjadikannya sektor basis utamanya, dan hanya terdapat dua wilayah yang memiliki nilai LQ lebih dari satu yakni Kabupaten Siak sebesar 1,02 dan Kota Pekanbaru sebesar 3,52.

n. Sektor Administrasi Pemerintahan

Nilai LQ yang melebihi angka satu terdapat pada enam wilayah yaitu Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 1,45, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,04, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,81, Kepulauan Meranti sebesar 1,23, Kota Pekanbaru sebesar 2,02 dan Kota Dumai sebesar 1,09. Akan tetapi tidak ada dari wilayah tersebut

yang menjadikan sektor ini sebagai sektor basis utama.

o. Sektor Jasa Pendidikan

Enam wilayah yang mempunyai nilai LQ lebih dari angka satu yakni Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 1,12, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1,46, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,01, Kabupaten Siak sebesar 1,02, Kabupaten Kampar sebesar 1,01 dan Kota Pekanbaru sebesar 2,01. Walaupun begitu tetap tidak ada wilayah yang menjadikan sektor ini sebagai sektor basis utamanya.

p. Sektor Jasa Kesehatan dan Sosial

Tidak terdapat wilayah yang menjadikan sektor ini sebagai sektor basis utamanya tetapi masih ada wilayah yang memiliki nilai LQ lebih dari angka satu yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1,04, Kabupaten Siak sebesar 1,10, dan Kota Pekanbaru sebesar 2,57.

q. Sektor Jasa Lainnya

Wilayah yang memiliki nilai LQ lebih dari angka satu yakni Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1,47, Kabupaten Siak sebesar 1,15, Kota Pekanbaru sebesar 2,31 dan Kota Dumai sebesar 1,05. Namun tidak ada yang menjadikannya sektor basis utamanya.

Analisis Tipologi Klassen

Dari hasil analisis Tipologi Klassen menggunakan pendekatan wilayah dapat dibahas sebagai berikut :

a. Kuadran I : Daerah maju dan cepat tumbuh

Yang termasuk dalam klasifikasi ini hanya satu daerah yaitu Kota Dumai, yang sebagai mana berarti Kota Dumai merupakan daerah yang sudah maju baik dari segi pembangunan dan kecepatan pertumbuhan.

- b. Kuadran II : Daerah maju tapi tertekan

Pada kuadran ke-dua ini ditemui bahwa Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis termasuk kepada klasifikasi daerah maju dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dikarenakan pendapatan per kapitanya yang tinggi, akan tetapi dari segi laju pertumbuhan ekonomi yang rendah membuat daerah ini menjadi tertekan.

- c. Kuadran III : Daerah yang berkembang cepat

Kabupaten/Kota yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru. Kabupaten/Kota ini mempunyai potensi pertumbuhan yang cepat tetapi pendapatan per kapitanya masih dibawah pendapatan perkapita Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan bahwa dimasa yang akan datang harus terus dikembangkan agar diperoleh pendapatan perkapita yang tidak relatif rendah.

- d. Kuadran IV : Daerah yang relatif tertinggal

Kabupaten/Kota yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan analisis tersebut menandakan bahwa masih terdapat daerah yang rendah pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita di Provinsi Riau. Dengan begitu daerah yang telah disebutkan harus dapat perhatian yang lebih dari pemerintah Provinsi Riau.

Analisis Ketimpangan Pendapatan

Nilai hasil analisis ketimpangan Indeks Williamson, menunjukkan angka ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode tahun 2015-2019 masih terjadi ketimpangan. Walaupun begitu nilai ketimpangan di Provinsi Riau cenderung menurun dari tahun ke tahunnya.

Menurut Indeks Entropi Theil masih terdapat ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama rentang waktu yakni dari tahun 2015-2019. Ditahun 2015 angka ketimpangannya sebesar 1,162, pada tahun 2016 angka ketimpangannya sebesar 1,160, tahun 2017 angka ketimpangannya adalah sebesar 1,159, tahun 2018 angka ketimpangannya sebesar 1,160 dan pada tahun 2019 angka ketimpangannya adalah sebesar 1,159. Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau cenderung menurun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, dan Rokan Hulu berbasis pada sektor pertanian. Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Rokan Hilir berbasis pada sektor pertambangan. Kabupaten Pelalawan, Siak dan Kota Dumai berbasis pada sektor industri

- pengolahan. Kabupaten Indragiri Hulu berbasis pada sektor pengadaan air, Kepulauan Meranti berbasis pada sektor transportasi dan Kota Pekanbaru berbasis pada sektor jasa keuangan.
2. Setelah dilakukan analisis Tippetologi Klassen dengan pendekatan wilayah didapatkan klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yaitu Kota Dumai berada di Kuadran I, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis berada pada Kuadran II, selanjutnya Kabupaten Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru berada di Kuadran III, dan pada Kuadran IV terdiri dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir.
 3. Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang dianalisis menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson dan Indeks Theil hasilnya yaitu bahwa ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama tahun 2015-2019 tergolong kepada kategori ketimpangan yang sedang. Akan tetapi Indeks Ketimpangan Williamson dan Indeks Theil yang menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota tersebut menunjukkan angka yang cenderung menurun dari tahun ke tahunnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka dapat diberikan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi disetiap sektor ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk daerah yang relatif tertinggal berdasarkan analisis Tipologi Klassen, diperlukan campur tangan pemerintah antara lain dengan mengadakan peningkatan, perluasan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, terlebih dalam memperhatikan wilayah-wilayah yang relatif tertinggal.
3. Untuk mengatasi terjadinya ketimpangan diperlukan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi, dan untuk mengatasi daerah tertinggal dan pemerataan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan baik secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

cetakan ke empat. Jakarta: Bumi Aksara.

Tarigan, R. (2007). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*

Todaro, M. P., & Stephen, C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.